

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bambang Sugiono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Endang Suhendang, 2013, *Pengantar Ilmu Kehutanan (Kehutanan Sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan, Dan Bidang Pekerjaaa.,* Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:Pustaka Harapan.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.,* Makasar: Pustaka Refleks.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indoesia.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardi Widyastuti, 2004, *Dasar-Dasar Perindungan Hutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Totok Soeprijanto, *Sumber-Sumber Kewenangan*, Widyaaiswara Puskdiklat PSDM.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Jurnal-Jurnal

Irwandi, Jumani dkk, “Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur”, Jurnal AGRIFOR Vol.XV No. 2, diakses pada 27 April 2018

Muin, Fatkhul, “Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2, Januari maret 2014

[http://forda-mof.org/files/Tekno\\_HT\\_1.1.2008-2.Acep\\_Akbar.pdf](http://forda-mof.org/files/Tekno_HT_1.1.2008-2.Acep_Akbar.pdf) , diakses pada 14 maret 2018

[http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104\\_47-59.pdf](http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf) , diakses pada 14 maret 2018

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemara Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

Peraturan Walikota Dumai Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **D. Internet**

<https://news.okezone.com/read/2018/02/21/340/1862509/3-lokasi-kebakaran-lahan-di-dumai-belum-bisa-dikendalikan>, diakses pada 27 April 2018

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/20/p4g1g6284-dumai-siaga-darurat-karhutla>, diakses pada 27 April 2018.

<http://www.zkilmochtar.com/wp-content/upload/2011/06/Kewenangan-Pusat-Dan-Daerah-Dalam-Pembngunan-Daerah-Di-Era-Otonomi.pdf>  
diakses pada tanggal 16 Mei 2018

[http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104\\_47-59.pdf](http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf), diakses pada 14 maret 2018, diakses pada 16 April 2018.

